



Laporan Keanggotaan UD Pulau Mas dalam Seafood Savers

Ringkasan dari perkembangan perbaikan, Fishing Gear – Ikan Karang dan Lobster, (Juli 2019 – Desember 2019)

Faridz Rizal Fachri – Capture Fisheries

Profile of Fisheries Improvement Project

UD Pulau Mas dalam proses bisnisnya menerapkan praktik perikanan yang bertanggungjawab dengan mempertimbangkan skema supply chain tertutup atau hanya membeli dari anggota yang terdaftar. Melalui sistem ini, perusahaan lebih mudah untuk memantau hasil produksi dan mengontrol nelayan yang menjual ikan ke Unit Penanganan Ikan (UPI) nya. Selain itu, UD Pulau Mas berencana akan menetapkan sistem kuota untuk anggota nelayannya dan melalui sistem ini pembagian kuota akan mudah untuk diimplementasikan. Konsep awal yang disampaikan oleh pimpinan UD Pulau Mas mengenai kuota ini adalah dengan memperhatikan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan pada tahun sebelumnya.

“Kalau ada nelayan yang menjualkan ikan milik non-anggota, otomatis akan mengurangi kuota dia sendiri”. Ujar Heru Purnomo, owner.

Bersama dengan WWF Indonesia, UD Pulau Mas melaksanakan implementasi perbaikan perikanan melalui pelatihan Better Management Practices (BMP) komoditas ikan kerapu untuk salah satu kelompok nelayan dampingan tim site WWF di Wakatobi (South and Eastern Sulawesi Seascape/ SESS). Kelompok tersebut adalah Antapulo yang mayoritas anggotanya berdomisili di Tomia. Kelompok ini menyumbang sekitar 40% total produksi UD Pulau Mas di Wakatobi. Pelatihan dilaksanakan di bulan Juni 2016 untuk 20 orang anggota kelompok Antapulo. Peningkatan pengetahuan kelompok berdasarkan nilai pre dan post-test adalah 15,61%.

Selanjutnya untuk memantau praktik nelayan terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip konservasi pada BMP, dilaksanakanlah penilaian tingkat kepatuhan praktik perikanan nelayan kelompok Antapulo pada bulan Februari 2017 dengan nilai kepatuhan awal (t_0) sebesar: 71,22%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, beberapa masalah utama yang perlu ditingkatkan oleh kelompok nelayan adalah pencatatan hasil tangkapan dan pendaftaran armada kapal.

Perihal pencatatan hasil tangkapan, memang UD Pulau Mas telah menerapkan sistem pencatatan berbasis digital dengan menggunakan perangkat IBM. Namun demikian, perlu bagi nelayan untuk mengetahui secara mandiri hasil tangkapan ikan kerapu dan jenis-jenis ikan lain yang tertangkap sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pengelolaan perikanan di Wakatobi. Oleh karena itu, pasca penilaian compliance, tim WWF melaksanakan pelatihan pengisian logbook kepada nelayan anggota Antapulo. Hal ini dimaksudkan agar nelayan lebih mengerti arti penting mengetahui hasil tangkapan dan familiar dengan form pendataannya.

Sementara itu, untuk pendaftaran armada kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kapal perikanan berapapun ukurannya harus memiliki pas kecil dan Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) atau SHTI apabila produk diekspor ke US dan Eropa. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, hampir semua armada belum tercatat di Dinas Perikanan Kab Wakatobi. WWF Indonesia mendorong perusahaan dan mendampingi nelayan dalam proses ini.

Selain dua hal yang masih perlu ditingkatkan tersebut, kelompok telah melaksanakan beberapa hal yang positif diantaranya adalah legalitas kelompok yang sudah ada, alat tangkap ramah lingkungan, dan menerapkan ukuran minimal tangkapan.

Perikanan ikan karang di Wakatobi terutama ikan kerapu, dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan tren penurunan hasil tangkapan. Untuk mencoba menggali informasi lebih dalam dan kuat secara ilmiah, dilakukanlah kajian *Historical Catch* yang melibatkan seluruh stakeholder di Wakatobi. Pendataan ini dilead oleh WWF Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui riwayat penangkapan kerapu di Wakatobi. Riwayat penangkapan ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen pemanfaatan perikanan (Harvest Strategy) ikan kerapu di Wakatobi.

Selain di Pulau Tomia, pada bulan Juni 2017 Tim site WWF Wakatobi bersama UD Pulau Mas juga melakukan implementasi perbaikan perikanan di Pulau Wanci kepada 2 kelompok yaitu Kelompok Sangheh Kami dan Kelompok Mitra Sunu yang juga merupakan suplayer UD Pulau Mas di Kab Wakatobi. Melalui pelatihan BMP komoditas Ikan Kerapu Kakap kepada 2 kelompok nelayan yang berasal dari suku Bajo di Kecamatan Mola ini Tim site WWF Wakatobi melakukan transfer pengetahuan seputar peraturan dan teknis penangkapan yang ramah lingkungan. Dari hasil pre dan post test pada saat pelatihan BMP diketahui adanya peningkatan pengetahuan sebesar 15,62%.

Beberapa program perbaikan yang dijalankan kepada ke 2 kelompok diatas antara lain penguatan kelompok serta legalitas kelompok untuk mendorong kemandirian kelompok, pencatatan hasil tangkapan melalui skema logbook dan juga update informasi serta peraturan seputar praktik penangkapan ikan kerapu dan kakap. Dari informasi dilapangan diketahui juga praktik penangkapan yang dilakukan oleh nelayan anggota kelompok Mitra Sunu dan Sangheh Kami sudah dikategorikan ramah lingkungan, dimana dapat dilihat dari alat tangkap yang digunakan yaitu pancing ulur serta ukuran hasil tangkapan seperti yang dipersyaratkan oleh UD Pulau Mas.

Pendampingan teknis juga turut diberikan dari DKP Kab Wakatobi melalui skema pertemuan bulanan kelompok. Dengan adanya pendampingan teknis ini menjadi momen bagi nelayan untuk berdiskusi terkait aktifitas penangkapan ikan kerapu kakap serta menjadi media update informasi kepada pemerintah dalam implementasi program perikanan yang sedang atau akan disusun kedepannya.

Pada bulan Februari 2018, Tim Seafood Savers bersama Tim site WWF Wakatobi melakukan penilaian tingkat kepatuhan kepada 2 kelompok nelayan anggota UD Pulau Mas yaitu kelompok Mitra Sunu dan Kelompok Sangheh Kami. Dari hasil penilaian didapatkan nilai compliance awal (T_0) untuk kelompok Mitra Sunu yaitu : 71,88 %. Secara umum pengetahuan tentang teknis penangkapan ikan karang yang ramah lingkungan sudah diketahui dengan baik oleh anggota kelompok ini, mulai dari alat tangkap yang digunakan hanya jenis pancing ulur (handline) sampai dengan ukuran ikan yang layak ditangkap dan diambil untuk dijual. Sedangkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki yaitu pada sikap saat melakukan aktifitas penangkana yaitu dengan tidak membuang sampah dilaut, pembersihan kapal sebelum dan setelah penangkapan dilakukan serta pengetahuan terkait wilayah larangan menangkap yang telah ditetapkan oleh otorita setempat (Balai TN Wakatobi).

Selain kelompok Mitra Sunu, Kelompok Sanggeh Kami juga dinilai untuk mengetahui tingkat kepatuhan awal (T_0) dari anggotanya terhadap standar BMP yang telah disusun oleh WWF Indonesia. Dari hasil penilaian didapatkan nilai compliance sebesar 73,32%. Seperti halnya kelompok Mitra Sunu, kelompok Sanggeh Kami juga masih memiliki beberapa hal yang perlu dikuatkan seperti pentingnya menyiapkan alat-alat keselamatan sebelum melakukan aktivitas penangkapan, dan tidak membuang sampah di laut.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan FIP yang telah dilakukan dalam kurun waktu bulan Juli – Desember 2019 untuk praktek perikanan FIP di wilayah Wakatobi, Sulawesi Tenggara

1. Pencatatan Data Perikanan
 - Pencatatan data perikanan telah dilakukan kepada nelayan target dampingan supply chain dari UD Pulau Mas di wilayah Pulau Wanci Wakatobi, yaitu teoatnya di wilayah Mola. Adapun jenis data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:
 - a. Data produksi penangkapan untuk menganalisis nilai CPUE (tersedia pada bulan Maret 2017 – sekarang)
 - b. Data biologi perikanan (target: sunu merah, sunu hitam, sunu cambang, kerapu macan) (tersedia mulai bulan Juli 2019 – sekarang)
 - c. One Data KKP, bersama dengan DKP Kabupaten Wakatobi memfasilitasi untuk uji coba One Data KKP dan juga pelatihannya kepada para penyuluh.
2. Pelaksanaan pre-assessment internal tim (Agustus 2019) untuk pembaharuan update kondisi perikanan ikan karang di Wakatobi (UD PM), guna perencanaan action plan untuk kelomok dampingan serta advokasi kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Sukabumi. Berikut ini adalah beberapa poin fokus grup kegiatan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan FIP (khusus untuk kegiatan perikanan UD PM di Wakatobi) (Gambar di samping).



3. Selain melakukan pendekatan advokasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait, berdasarkan dari pelaksanaan pre-assessment tersebut kemudian dipilah jenis kegiatan action plan yang dapat dilakukan pada tahapan kelompok dampingan yang mana kegiatan tersebut dapat kontribusi kepada progress FIP, seperti:
 - Pencatatan hasil tangkapan
 - Praktek penangkapan ikan yang baik (Better Management Practices)
 - Keorganisasian dan kelembagaan kelompok
 - Turut partisipatif dalam pengawasan yang ada di wilayah lokasi penangkapan bersama Taman Nasional
 - Legalitas armada dan perizinan penangkapan (pas kecil, KUSUKA, BPKP)
 - Dan kegiatan lainnya yang berhubungan dan kontribusi pada rencana aksi FIP
4. Sedangkan untuk kegiatan rencana aksi FIP dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi serta stakeholder terkait, fokus pada beberapa kegiatan yang meliputi:
 - Advokasi reglasi terkait dengan pendampingan nelayan, dan praktek perikanan berkelanjutan: mendorong Peraturan Bupati terkait Perikanan Berkelanjutan, serta Peraturan Daerah terkait dengan perikanan (mencakup perikanan tangkap dan budidaya). Adapun status dari perkembangan advokasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. Peraturan Bupati → sudah dilakukan beberapa kali revisi dan konsultasi publik, sekarang dokumen telah mendapat input dari DKP Propinsi, dan dijadwalkan tim SESS akan bertemu langsung dengan DKP untuk membahas hasil inputan.
 - B. Peraturan Daerah → telah dilakukan konsultasi publik pada draft awal, beberapa masukan telah dihimpun dan sekarang pada tahapan revisi sesuai dengan masukan konsultasi publik.
 - Mendorongkan adanya Pokja (Kelompok Kerja) Perikanan Berkelanjutan di Wakatobi
 - Menjalin komunikasi dan koordinasi bersama para stakeholder di lapangan dalam memantau progress FIP, termasuk salah satunya adalah melakukan pertemuan secara periodic (4 bulanan) membahas FIP yang telah dilakukan.
 - Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi penelitian atau akademik dalam hal kolaborasi penelitian ilmiah yang berkontribusi pada agenda rencana aksi FIP.
5. Koordinasi dan pertemuan telah dilakukan bersama dengan perwakilan UD PM di Bali membahas terkait dengan rencana aksi FIP di Wakatobi, adapun yang dibahas adalah sebagai berikut:
 - Hasil pendataan yang telah dilakukan oleh tim untuk data perikanan dan biologis ikan karang
 - Sharing terkait dengan perkembangan beberapa isu yang dihadapi UD PM terkait dengan beberapa lokasi yang ada di Indonesia
 - UD PM untuk di Wakatobi berencana untuk menaikkan minimum size sebesar 600 gram yang sebelumnya adalah 500 gr untuk semua jenis ikan kerapu dan sunu

- Berkenaan dengan beberapa agenda tersebut, UD PM bersama WWF ID akan melakukan kunjungan ke lapangan (Wakatobi) untuk mensosialisasikan terkait minimum size ini kepada para nelayan supply chain UD PM
- UD PM merasa akan lebih aman dan nyaman ketika adanya MoU bersama dengan otoritas pengelola perairan setempat (TN Wakatobi), sehingga adanya kemitraan antara pengelola dengan pengusaha/swasta dalam TN juga akan menjadi lebih baik.
-

Membership evaluation details (UD Pulau Mas) based on the implemented Fisheries Improvement Project (FIP):

Action Name (Strategies)	Main Activities	Detail Activities (FIP)	Relevant Indicators	Seafood Savers Stage		Action Lead and Partner	Evaluation Result	Follow Up Plan
				Intermediate	Advance			
Conduct studies and document developments	Studi penilaian stok dan HCR	Mendukung studi penilaian stok dan HCR dengan mengumpulkan data logbook, data biologis, dan data komposisi tangkapan. Pengumpulan data dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan penilaian stok dan studi HCR	1.1.1 1.1.3 1.2.4 2.1.1 2.2.1 2.3.1			P4KSI/BPPL, University in Makassar, Company		
	Tinjauan literatur	Melakukan kajian ilmiah tentang indikator stok ikan karang	1.1.1 1.2.3			P4KSI, BPPL and local universities		
	Risk assessment	Usaha Risk Based Assessment	1.1.1 2.2.1			P4KSI, BPPL, DKP, and Hasanudin University in Makassar, NGOs, Community, middlement, processors	Kajian RBF sudah dilakukan bersama dengan konsultan Universitas Muhammadiyah dan stakeholder terkait. Telah dilakukan	

						desimenasi TN Wakatobi, DKP Wakatobi, Bappeda Wakatobi, BKIPN untuk mendorong peraturan praktek perikanan berkelanjutan di wilayah Wakatobi.	
	Komposisi armada	P4KSI dan universitas lokal akan melakukan studi tentang upaya terbaik yang diizinkan dalam perikanan dan solusi untuk mengurangi effort	1.2.3			DKP Prov & District	Seluruh armada penangkapan UD Pulau Mas tergolong small scale fisheries dengan armada tangkap di bawah 5 GT.
	Mengumpulkan data Bycatch	Meningkatkan modul pelatihan observer/enumerator yang ada, terutama pada rekaman data bycatch (perlu lebih rinci daripada data saat ini tersedia)	2.2.1 2.2.2 2.2.3			SDI, KKJI, P4KSI, University, PLN, KAPI, Agency of MAF in Province & District	Pendataan sudah dilakukan (produksi tangkapan ikan kerapu dan lobster, pendataan biologi panjang dan berat 4 jenis kerapu).
	Underwater mapping	Mengidentifikasi metodologi tentang	2.4.1 2.4.2			KKJI, NGO, universities,	Untuk wilayah site Wakatobi,

		sistem monitoring habitat dan melakukan pelatihan	2.4.3			Agency of MAF in Province & District and buyers/processors	aktivitas monitoring habitat dan ekosistem sudah berjalan dengan baik. Ini melalui skema monitoring secara berkala dan rutin antara TN Wakatobi, DKP Wakatobi dan WWF.	
		Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk pemantauan habitat	2.4.1 2.4.2 2.4.3			Company		
	Pemodelan ekosistem	Universitas setempat melakukan penelitian	2.5.1 2.5.2 2.5.3			BPPL, Hasanudin University in Makassar	Untuk wilayah site Wakatobi, aktivitas monitoring habitat dan ekosistem sudah berjalan dengan baik. Ini melalui skema monitoring secara berkala dan rutin antara TN Wakatobi, DKP Wakatobi dan WWF.	

	Peer review tentang efektivitas Research Programme.	Melakukan assessment review	1.2.4			Independent reviewer	Belum dilakukan	
	Tinjauan dampak pada subsidi bahan bakar pada keberlanjutan, 5-30GT; dan <5 kapal GT	Perusahaan yang terlibat dalam studi tentang peluang dan tantangan subsidi perikanan di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan	3.1.4			PDN, PLN, BBRSE	Fisheries subsidi pernah dilakukan di Wakatobi hingga adanya draft peraturan Wakatobi, namun belum ada kelanjutan.	
		Terlibat dalam studi subsidi perikanan	3.1.4			Company		
Policy works	Menyempurnakan tujuan untuk memastikan bahwa prioritas diberikan kepada perikanan berkelanjutan dan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten	Memfasilitasi proses pengembangan EAFM dan atau peraturan lain yang mempromosikan prinsip perikanan berkelanjutan	3.1.1 3.1.3 3.2.1			SDI, P4KSI, Agency of MAF in Province & District	Sudah dilakukan kajian EAFM 2 tahunan (2016 dan 2018).	
		Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi EAFM dan atau peraturan lain yang mempromosikan prinsip perikanan berkelanjutan	3.1.1 3.1.3 3.2.1			Company	Belum dilakukan	
	Memperpanjang sistem manajemen ke tingkat lokal	Memfasilitasi peraturan Propinsi / Kabupaten sebagai interpretasi dari	3.1.1 3.1.3			SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP	Belum dilakukan	

		keputusan menteri tentang rencana pengelolaan perikanan, yang meliputi Peraturan Pengendalian Panen						
		Perusahaan menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam rencana pengelolaan perikanan Provinsi / Kabupaten sebagai pelindung pengembangan dan implementasi di wilayah tersebut. Rencana tersebut akan memiliki aturan pengendalian panen dengan melibatkan prinsip-prinsip berkelanjutan mis. ukuran penangkapan minimum, sesuaikan jumlah upaya mengikuti daya dukung stok	3.1.1 3.1.3			Company	Belum dilakukan Perusahaan masih mengacu pada ukuran panjang minimum yang dapat dijual di UD Pulau Mas.	
		Memfasilitasi peraturan provinsi / kabupaten sebagai perpanjangan dari peraturan EAFM dan atau peraturan	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.3			SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP	Praktik perikanan berkelanjutan masih dalam tahap advokasi dengan stakeholder	

		nasional lainnya yang mempromosikan prinsip perikanan ikan karang berkelanjutan					terkait di Wakatobi.	
		Perusahaan menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam pedoman EAFM Indonesia dan atau peraturan nasional lainnya yang mempromosikan prinsip perikanan ikan karang berkelanjutan sebagai pelindung pengembangan dan implementasi EAFM di tingkat Provinsi / Kabupaten	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.3			Company	Sudah dilakukan. Perusahaan UD Pulau Mas memiliki sistem yang cukup baik dalam melakukan praktik perikanan berkelanjutan (penerapan keanggotaan nelayan, penerapan minimum size ikan, menolak ikan hasil racun atau potas, perusahaan menerapkan kuota ikan yang bisa dijual ke keramba kepada jaringan anggota nelayannya)	
	Pengembangan rencana pengelolaan khusus perikanan (Rencana Pengelolaan Perikanan)	Mengembangkan dan mengadopsi prinsip-prinsip rencana pengelolaan ikan karang di daerah	3.1.1 3.2.1			SDI, Agency of MAF in Province & District, Hasanudin University in	Praktik perikanan berkelanjutan masih dalam tahap advokasi dengan	

		tersebut				Makassar	stakeholder terkait di Wakatobi.	
		Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana manajemen (mis. Memberikan surat pada rencana manajemen, secara proaktif menghadiri rapat jika diperlukan)	3.1.1 3.2.1			Company	Sudah dilakukan. Perusahaan UD Pulau Mas memiliki sistem yang cukup baik dalam melakukan praktik perikanan berkelanjutan (penerapan keanggotaan nelayan, penerapan minimum size ikan, menolak ikan hasil racun atau potas, perusahaan menerapkan kuota ikan yang bisa dijual ke keramba kepada jaringan anggota nelayannya)	
	Pengembangan Hak Pengguna Teritorial untuk Perikanan	Memulai lokakarya tentang TURF (atau tindakan RBM lainnya) yang juga akan mengidentifikasi tindakan yang	3.1.1			SDI, Agency of MAF in Province & District, Community fishers, NGOs, Hasanudin	Belum dilakukan	

		diperlukan untuk mengembangkan mekanisme				University in Makassar		
		Menerapkan TURF (atau tindakan RBM lainnya) untuk mengelola perikanan	3.1.1			KKJI, Agency of MAF in Province & District, Community fishers, NGOs	Belum dilakukan	
		Perusahaan yang memfasilitasi penerapan mekanisme TURF (atau tindakan RBM lainnya)	3.1.1 3.1.3			Company	Belum dilakukan	
Delineate no take zones		Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang diperlukan untuk mengembangkan sistem zona larang tangkap yang baru atau yang sudah ada	3.1.1 3.1.3			KKJI, Agency of MAF in Province & District, Community fishers, NGOs	Wilayah perairan Wakatobi sudah masuk dalam zonasi TN Wakatobi	
		Menentukan no take zone dengan peraturannya untuk mendukung perikanan berkelanjutan	3.1.1 3.1.3			KKJI, Agency of MAF in Province & District, Community fishers, NGOs	Wilayah perairan Wakatobi sudah masuk dalam zonasi TN Wakatobi	
		Menerapkan hasil delineasi zona	3.1.1 3.1.3			KKJI, Agency of MAF in Province & District, Community fishers, NGOs	Wilayah perairan Wakatobi sudah masuk dalam zonasi TN Wakatobi	
Memperbaiki struktur	Memfasilitasi		1.2.2			SDI, Agency of	Pembahasan	

	sistem manajemen perikanan	ketersediaan peraturan (mis. Keputusan menteri) yang mempromosikan sub FKPPS dan atau otoritas manajemen nasional (mis. Gugus tugas) untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan ikan karang	3.1.1 3.1.2			KKP in province and district, NGOs, stakeholders	terkait dengan komoditas LRFT (Life Reef Fish Trade) sedang dalam pembahasan KKP (KKHL) dalam rangka ICRI	
		Secara aktif melibatkan industri, lembaga penelitian, LSM dalam pertemuan terkait dengan pengambilan keputusan perikanan	3.1.2 3.2.2			SDI, Agency of KKP in province and district, NGOs, stakeholders	Pembahasan terkait dengan komoditas LRFT (Life Reef Fish Trade) sedang dalam pembahasan KKP (KKHL) dalam rangka ICRI. WWF mensupport kegiatan tersebut berdasarkan pada lesson learn UD Pulau Mas	
		Perusahaan mendukung dan terlibat secara proaktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan provinsi /	3.2.2			Company	Perusahaan telah berkontribusi dalam pengelolaan perikanan ikan karang di Indonesia	

		Kabupaten (mis. Menghadiri pertemuan)						
	Identifikasi tanggung jawab dan pengembangan kapasitas di berbagai badan pelaksana	Memfasilitasi ketersediaan peraturan (mis. Keputusan menteri, keputusan direktorat jenderal) tentang alokasi tugas dengan uraian tugas spesifik kepada lembaga yang tepat untuk mendukung manajemen perikanan	3.1.2			SDI, Agency of KKP in province and district, DKP, community stakeholders, NGOs.	Belum dilakukan	
	Memperkuat kapasitas manusia dan institusi untuk penilaian stok di Indonesia	Mengembangkan kebijakan perusahaan untuk berkomitmen dalam mendukung pengumpulan data untuk penilaian stok dengan memfasilitasi kegiatan penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi mereka (mis. Buku Catatan, wawancara, pengambilan sampel gonad, dll.)	1.1.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1			Company	Sedang dilakukan dalam pendataan.	
	Komposisi armada	Pemerintah daerah akan mengembangkan peraturan dan	1.2.3			P4KSI, BPPL, DKP, and Hasanudin University in	Peraturan bupati untuk praktek perikanan	

		memfasilitasi implementasi untuk mengurangi upaya tersebut				Makassar, NGOs, Community, middlement, processors	berkelanjutan di Wakatobi namun tidak berbicara mengenai kuota armada.	
		Perusahaan berpartisipasi dalam menerapkan peraturan pada rantai pasokan mereka	1.2.3			Company	Sudah dilakukan. Perusahaan UD Pulau Mas memiliki sistem yang cukup baik dalam melakukan praktik perikanan berkelanjutan (penerapan keanggotaan nelayan, penerapan minimum size ikan, menolak ikan hasil racun atau potas, perusahaan menerapkan kuota ikan yang bisa dijual ke keramba kepada jaringan anggota nelayannya)	
	Mengumpulkan data Bycatch	Perusahaan yang berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk penilaian stok	2.2.1 2.2.2 2.2.3			Company	Sudah dilakukan. Perusahaan UD Pulau Mas memiliki sistem	

		dengan memfasilitasi kegiatan penelitian dan menyediakan akses ke pekerjaan pengamat / enumerator di kapal penangkap ikan dan pengumpulan ikan mereka, yang melibatkan universitas dan masyarakat setempat					yang cukup baik dalam melakukan praktik perikanan berkelanjutan (penerapan keanggotaan nelayan, penerapan minimum size ikan, menolak ikan hasil racun atau potas, perusahaan menerapkan kuota ikan yang bisa dijual ke keramba kepada jaringan anggota nelayannya)	
	Mendefinisikan peran POKMASWAS dan menentukan tindakan	Memfasilitasi pembentukan PokMasWas, disiapkan dengan rencana pengawasan dan pemantauan praktik penangkapan ikan (termasuk pengembangan kelembagaan dan kapasitas)	3.2.3			PSDP, Agency of MMAF in province and district / POKMASWAS	Belum dilakukan	
		Perusahaan mengembangkan	3.2.3			Company		

		kebijakan untuk mendukung pembentukan dan pengoperasian PokMasWas						
	Memperkuat undang-undang tentang sanksi	Memfasilitasi pemerintah dalam meningkatkan sanksi peraturan, meningkatkan mekanisme pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran hukum	3.2.3			PSDP/MMAF Legal Department	Praktek perikanan yang merusak di wilayah TN akan ditindak tegas.	
		Perusahaan mengembangkan kebijakan tentang implementasi undang-undang	3.2.3			Company		
	Penjangkauan pendidikan	Memfasilitasi pelatihan tentang pengawasan terhadap PokMasWas dan PSDP di provinsi dan kabupaten	3.2.3			DKP District, BPPL, WWF and processors		
		Facilitating the workplan synchronization with other surveillance stakeholders to improve the surveillance and enforcement	3.2.3			DKP District, BPPL, WWF and processors, all stakeholders		

		Company developing policy and supporting enforcement officers work in the field	3.2.3			Company		
	Laporan yang disiapkan dan tersedia untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terdeteksi	Memfasilitasi pengumpulan laporan tentang kepatuhan terhadap peraturan	3.2.3			PSDP, Agency of MAF in province and district	Belum dilakukan	
		Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs web MMAF	3.2.3			PSDP, Agency of MAF in province and district	Belum dilakukan	
		Perusahaan mengembangkan kebijakan tentang mendukung pengumpulan data dan persiapan laporan tentang pelanggaran peraturan	3.2.3			Company	Belum dilakukan	
Capacity building	Memperkuat kapasitas manusia dan institusi untuk penilaian stok di Indonesia	Workshop penilaian stok; termasuk metodologi pengumpulan & analisis data, rencana sinkronisasi	1.1.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1			P4KSI, BPPL and Hasanudin University in Makassar	Belum dilakukan	
		Pelatihan penilaian stok, biologi perikanan dan kapasitas perikanan	1.1.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1			P4KSI, BPPL and Hasanudin University in Makassar	Belum dilakukan	
	Risk assessment	Lokakarya pelatihan	1.1.1			P4KSI, BPPL, DKP,	Belum dilakukan	

		tentang penilaian risiko, termasuk simulasi	2.2.1			and Hasanudin University in Makassar, NGOs, Community, middlement, processors		
	Produktivitas stok	Lokakarya dengan pemangku kepentingan lainnya tentang pengumpulan data	1.1.1			P4KSI, BPPL, SDI, University, industry (direct from haji and buying companies)	Pelatihan satu data KKP di Wakatobi sudah dilakukan	
	Memperkuat kapasitas nelayan, pemangku kepentingan, dan pengamat / enumerator melalui sosialisasi dan pelatihan	Training untuk observer/enumerator	2.2.1 2.2.2 2.2.3			P4KSI, BPPL	Sudah dilakukan	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sanksi bagi pemangku kepentingan perikanan ikan karang		3.2.3			PSDP/MMAF Legal Department, fishermen	Belum dilakukan		
Pelatihan tentang langkah-langkah pengelolaan (mis. Spesies sasaran, pengurangan bycatch dan konsekuensi interaksi ekosistem) bagi nelayan: - Menggunakan BMP untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan		3.2.3			Company	BMP sudah dilakukan pendampingan dan pelatihan pada 3 kelompok yaitu KUB Sanggeh Kami, KUB Mitra Sunu, dan KUB Antapulo.		

		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan BMP untuk meningkatkan kualitas ikan yang tinggi untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan - Menggunakan BMP untuk mitigasi bycatch - catatan penelusuran 						
Monitoring	Memperbaiki struktur sistem manajemen perikanan	Memantau dan mengevaluasi kinerja otoritas pengelolaan Provinsi / Kabupaten yang dilakukan oleh lembaga internal dan eksternal KKP-MAF Provinsi / Kabupaten untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan ikan karang	3.2.3 3.2.5			SDI, Agency of KKP in province and district, NGOs, stakeholders	Belum dilakukan	
	Underwater mapping	Sistem pemantauan dilakukan setiap tahun	2.4.1 2.4.2 2.4.3			KKJI, NGO, universities, Agency of MAF in Province & District and buyers/processors	Sudah dilakukan	
	Mendefinisikan peran POKMASWAS dan menentukan tindakan	Memantau kinerja PokMasWas sebagai bagian dari sistem manajemen	3.2.3			PSDP, Agency of MMAF in province and district / POKMASWAS	Belum dilakukan	
	Pelaksanaan audit	Melakukan audit	-				Berdasarkan BMT	

	tahunan	internal tiap tahun						
Audit MSC dan MSC CoC	Persiapan akhir sertifikasi	Melakukan penilaian akhir secara internal	-					Belum dilakukan
	Pelaksanaan audit MSC dan CoC	Identifikasi dan seleksi Certification Body	-					Belum dilakukan
		Perusahaan mengikuti petunjuk sebagaimana panduan dari MSC dan MSC CoC sistem	-					Belum dilakukan
	Adaptasi	Sesuai dengan hasil audit MSC, apabila ada temuan Major maupun Minor, perusahaan perlu melakukan kegiatan sebagaimana petunjuk dari CB	-					Belum dilakukan